

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan serius yang dapat mengganggu proses pendidikan serta mengancam keselamatan dan kesejahteraan civitas akademika. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya terbatas pada satu jenis, tetapi mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan (bullying), hingga diskriminasi. Kondisi ini didukung oleh data dari berbagai lembaga resmi. Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, permohonan perlindungan kasus kekerasan meningkat sebesar 25,82%, dari 426 kasus pada tahun 2021 menjadi 536 kasus pada tahun 2022 [1]. Selain itu, laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa sebesar 27% kasus kekerasan seksual yang dilaporkan sepanjang tahun 2015–2020 terjadi di lingkungan perguruan tinggi [2]. Lebih lanjut, data dari Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat terdapat 2.244 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi selama tahun 2023, dan hingga pertengahan November 2024 telah tercatat sebanyak 1.919 kasus [3]. Data-data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan yang serius dan memerlukan penanganan yang sistematis dan terstruktur. Fenomena ini menunjukkan bahwa lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi tantangan dalam menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus secara terstruktur dan berorientasi pada perlindungan korban. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala konkret. Sistem pelaporan belum terintegrasi secara digital dan belum dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor secara sistematis. Selain itu, belum tersedia fitur pelacakan status kasus yang memungkinkan pelapor memantau perkembangan laporannya secara mandiri. Kondisi ini sebagaimana ditemukan pula dalam observasi awal di Universitas Harkat Negeri, di mana pelaporan kasus masih dilakukan melalui WhatsApp dan belum didukung sistem digital yang memadai, serta belum menyediakan mekanisme *tracking* status laporan bagi pelapor.

Fediro dan Sutabri (2023) menemukan bahwa rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seringkali disebabkan oleh keterbatasan sistem pelaporan yang belum mampu menjamin keamanan bagi pelapor [4]. Sejalan dengan itu, Miksilmina et al. (2020) menyatakan bahwa kemudahan akses sistem juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keinginan korban dalam melaporkan kejadian yang dialaminya [5]. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengembangan sistem informasi yang mampu menjamin keamanan serta kenyamanan pelapor. Selain itu, penelitian Mufreni dan Rosida (2021) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efektivitas pelaporan serta mempermudah pengelolaan data kasus secara terstruktur dan terpusat [6].

Selanjutnya, penelitian Aryadi et al. (2023) mengungkapkan bahwa sistem pelaporan berbasis web tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai sarana edukasi terkait hak korban dan prosedur penanganan kasus [7]. Penelitian oleh Rohmah et al. (2025) menunjukkan bahwa pengembangan sistem pelaporan berbasis digital mampu meningkatkan kemudahan akses serta membantu pengelolaan laporan secara lebih terstruktur, sehingga mendukung efektivitas penanganan kasus kekerasan di lingkungan institusi [8].

Di sisi lain, penelitian Daimoye dan Marianingsih (2025) menyatakan bahwa sistem informasi pengaduan berbasis web yang dilengkapi fitur monitoring dan evaluasi mampu meningkatkan responsivitas serta transparansi dalam penanganan kasus kekerasan [9]. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hidayat et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan digital dapat meningkatkan jumlah pelaporan karena memberikan rasa aman melalui perlindungan identitas pelapor [10]. Selain itu, penelitian Alanshori et al. (2025) menegaskan bahwa pengembangan platform pelaporan khusus di lingkungan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sistem konvensional yang masih manual dan tidak terstruktur [11].

Meskipun berbagai penelitian telah mengembangkan sistem pelaporan berbasis web, sebagian besar masih berfokus pada fungsi pelaporan saja dan belum mengintegrasikan seluruh proses penanganan kasus secara komprehensif. Keterbatasan tersebut meliputi belum adanya integrasi antara pelaporan, manajemen kasus, *tracking* status laporan, serta pengelolaan data yang terpusat dalam satu sistem yang utuh. Selain itu, masih sedikit penelitian yang

menggabungkan aspek keamanan data, kemudahan penggunaan, serta evaluasi sistem secara menyeluruh dalam konteks PPKPT.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terindeks SINTA 3–5 dalam beberapa tahun terakhir, belum ditemukan sistem informasi yang secara khusus dirancang untuk konteks PPKPT di perguruan tinggi dan secara bersamaan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu: (1) pelaporan dengan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor yang hanya dapat diakses oleh Tim PPKPT yang berwenang, (2) manajemen kasus oleh Tim PPKPT secara terstruktur, dan (3) *tracking* status laporan secara mandiri oleh pelapor. Ketiga komponen ini merupakan kebutuhan mendasar yang diamanatkan oleh Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, namun belum terpenuhi dalam satu sistem yang terintegrasi. Secara lebih spesifik, penelitian-penelitian sebelumnya seperti Fediro dan Sutabri (2023) serta Miksilmina dkk. (2020) hanya memenuhi komponen pertama (pelaporan), tanpa mengintegrasikan komponen manajemen kasus oleh Tim PPKPT maupun *tracking* status. Aryadi dkk. (2023) memenuhi komponen pertama dan menambahkan fitur edukasi, namun tidak menyediakan alur manajemen kasus. Belum ada satu pun penelitian terdahulu yang mengintegrasikan ketiga komponen sekaligus dalam satu sistem yang dirancang khusus untuk konteks PPKPT perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilaksanakan pada 11 Desember 2025 dengan pengurus PPKPT Universitas Harkat Negeri sebagai bagian dari identifikasi masalah awal sebelum penelitian formal dimulai, diketahui bahwa mekanisme penanganan kekerasan di lingkungan kampus telah ada sejak

masa satuan tugas PPKS. Perlu dicatat bahwa observasi ini dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian formal yang direncanakan dimulai pada Maret 2026. Namun, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Tim PPKPT, selama periode 2024 hingga 2025 hanya tercatat satu laporan kasus yang masuk. Rendahnya jumlah laporan tersebut bukan semata-mata mencerminkan minimnya kejadian, melainkan merupakan dampak dari belum optimalnya sistem dan kelembagaan PPKPT itu sendiri. Pengurus PPKPT menjelaskan bahwa pada masa PPKS, satuan tugas ini terbentuk hanya untuk memenuhi kewajiban dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), tanpa disertai pembimbingan, anggaran, maupun dukungan kelembagaan yang memadai dari institusi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan dan kesadaran civitas akademika untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Satu-satunya kasus yang tercatat berhasil ditangani hingga tuntas dalam waktu kurang lebih satu minggu dan diselesaikan melalui koordinasi dengan unit Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) kampus. Meskipun demikian, proses koordinasi yang dilakukan sepenuhnya bersifat manual dan bergantung pada ketersediaan masing-masing pihak, sehingga tidak dapat dilakukan secara langsung dan efisien. Adapun mekanisme pelaporan yang tersedia saat ini hanya melalui pesan WhatsApp menggunakan nomor kontak unit Alumni Karir yang pada saat itu masih berafiliasi dengan PPKPT, bukan melalui saluran khusus PPKPT. Perlu dicatat bahwa pada perkembangan selanjutnya, PPKPT Universitas Harkat Negeri tidak lagi berada di bawah unit Alumni Karir, meskipun perubahan kelembagaan tersebut belum disahkan secara resmi pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Penggunaan WhatsApp sebagai media pelaporan tidak dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor secara sistematis, tidak mendukung pendokumentasian kasus secara terstruktur, serta tidak menyediakan fitur *tracking* status yang memungkinkan pelapor memantau perkembangan kasusnya secara mandiri. Meskipun Tim PPKPT telah berupaya menjaga kerahasiaan identitas korban secara informal, pendekatan tersebut sepenuhnya bergantung pada prosedur manual yang tidak terdokumentasi. Akibatnya, konsistensi perlindungan identitas dalam jangka panjang tidak dapat dijamin. Selain itu, hingga saat ini PPKPT di Universitas Harkat Negeri masih berstatus satuan tugas dan belum memiliki pedoman operasional PPKPT yang resmi, sehingga sosialisasi kepada civitas akademika pun belum dapat dilaksanakan. Observasi awal ini secara langsung mengonfirmasi ketiga komponen kesenjangan yang telah diidentifikasi. Pertama, penggunaan WhatsApp sebagai media pelaporan tidak dapat menjamin kerahasiaan identitas secara sistematis. Kedua, tidak adanya pembagian tugas berbasis peran secara digital menjadi hambatan pengelolaan kasus yang terstruktur. Ketiga, belum tersedianya fitur pelacakan status kasus membuat pelapor tidak dapat memantau perkembangan kasusnya secara mandiri. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi pengembangan sistem informasi yang terstruktur, aman, dan terintegrasi sebagai fondasi operasional PPKPT ke depan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Informasi Pelaporan dan Manajemen Kasus PPKPT berbasis web yang terintegrasi. Sistem ini dikembangkan menggunakan pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*, serta

dimodelkan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Implementasi sistem dilakukan menggunakan *framework Laravel* dan *database MySQL*. Adapun fitur utama yang dikembangkan meliputi pelaporan online dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor, pengelolaan kasus oleh Tim PPKPT melalui *dashboard* administrator, serta *dashboard* monitoring. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black box testing* untuk menguji fungsionalitas sistem dan *User Acceptance Test* (UAT) untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Dengan demikian, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efektivitas pelaporan, transparansi penanganan kasus, serta memberikan rasa aman bagi civitas akademika di Universitas Harkat Negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Pelaporan dan Manajemen Kasus PPKPT berbasis *web* menggunakan metode *Waterfall* dan *framework Laravel* di Universitas Harkat Negeri?
2. Bagaimana mekanisme pembatasan akses berbasis autentikasi administrator melalui *middleware AdminAuth* diterapkan untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor dalam proses pelaporan kasus kekerasan pada sistem informasi PPKPT berbasis *web* yang dikembangkan?
3. Bagaimana fitur *dashboard*, perubahan status laporan, dan pencatatan catatan penanganan kasus memfasilitasi Tim PPKPT dalam mengelola

kasus kekerasan secara terstruktur dan responsif?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan mencakup fitur-fitur utama meliputi: pelaporan *online* dengan identitas pelapor (nama, nomor HP, *email*) yang dijamin kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh Tim PPKPT yang berwenang, *form* kejadian (tanggal, waktu, kategori, lokasi, kronologi), unggah bukti pendukung, sistem *tracking* status dengan kode unik (format: PPKPT-YYYY-XXXXX), dan halaman informasi PPKPT.
2. Ruang lingkup pelaporan terbatas pada kasus kekerasan di lingkungan Universitas Harkat Negeri, dengan kategori kejadian dipilih melalui *dropdown* menu.
3. Pengguna sistem terdiri dari dua *role* utama: *user*/pelapor (civitas akademika) dan admin/Tim PPKPT.
4. Mekanisme keamanan akses pada sistem diimplementasikan menggunakan autentikasi administrator berbasis *middleware* AdminAuth yang membatasi seluruh rute area administrasi hanya dapat diakses oleh administrator yang telah terautentikasi, menjamin bahwa data identitas pelapor dan seluruh data laporan hanya dapat diakses oleh Tim PPKPT yang berwenang.
5. Sistem dikembangkan menggunakan teknologi *web* dengan *framework* *Laravel* (PHP), *database* *MySQL*, dan *web server* *Apache* menggunakan

metode pengembangan *Waterfall*.

6. Penelitian ini tidak mencakup integrasi dengan layanan eksternal seperti *email notification*, *SMS gateway*, atau sistem informasi akademik universitas.
7. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black box testing* untuk menguji fungsionalitas setiap fitur dan *User Acceptance Test* (UAT) untuk mengukur kepuasan dan kepercayaan pengguna terhadap sistem, dengan implementasi yang dilakukan di lingkungan Universitas Harkat Negeri melibatkan Tim PPKPT dan perwakilan civitas akademika sebagai responden pengujian.
8. Penelitian ini menggunakan pendekatan *formative evaluation* di mana pengujian *User Acceptance Test* (UAT) dan *pilot test* tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi hasil secara statistik terhadap seluruh populasi civitas akademika Universitas Harkat Negeri. Jumlah responden yang dilibatkan dalam pengujian ini, yaitu 13 orang untuk *pilot test* dan 20 orang untuk UAT, ditentukan melalui teknik *purposive sampling* untuk mewakili peran-peran pengguna utama yang relevan (Tim PPKPT, dosen, staf, dan mahasiswa dari tiga program studi berbeda). Jumlah responden tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh populasi civitas akademika Universitas Harkat Negeri, melainkan untuk memperoleh umpan balik yang representatif dari masing-masing peran pengguna sistem. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih berfokus pada validasi fungsionalitas sistem dan pengukuran tingkat penerimaan

(*acceptance*) oleh perwakilan pengguna yang terlibat langsung, bukan pada pengukuran inferensial terhadap keseluruhan populasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Pelaporan dan Manajemen Kasus PPKPT berbasis *web* menggunakan metode *Waterfall* dan *framework Laravel* di Universitas Harkat Negeri.
2. Menghasilkan mekanisme keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor dalam sistem informasi PPKPT berbasis *web* yang dikembangkan.
3. Menghasilkan sistem informasi PPKPT berbasis *web* yang memfasilitasi Tim PPKPT dalam mengelola kasus kekerasan secara terstruktur, mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut penanganan.
4. Mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem informasi PPKPT berbasis *web* yang dikembangkan melalui UAT dengan indikator kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan identitas, manajemen kasus bagi Tim PPKPT, serta kepuasan penggunaan secara umum, serta memastikan seluruh fitur berfungsi sebagaimana mestinya melalui *Black box testing*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Universitas Harkat Negeri (Objek Penelitian)

1. Meningkatkan kualitas layanan pelaporan dan penanganan kasus PPKPT melalui sistem berbasis web yang memungkinkan pelaporan dilakukan secara mudah, aman, dan terstruktur, serta dapat diakses kapan saja oleh pelapor.
2. Meningkatkan efisiensi kinerja Tim PPKPT dalam mengelola, memproses, dan memantau kasus melalui sistem yang terintegrasi, sehingga mempermudah koordinasi, pengambilan keputusan, dan penyimpanan data secara terpusat. Sebagaimana ditegaskan pada Batasan Masalah, peningkatan efisiensi ini merupakan potensi manfaat jangka panjang dari implementasi sistem secara berkelanjutan, dan tidak diukur secara langsung dalam lingkup penelitian ini.
3. Menyediakan sistem pelaporan yang terdokumentasi, transparan, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program PPKPT di Universitas Harkat Negeri.

1.5.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi pelaporan berbasis *web* pada penelitian sejenis.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sistem informasi, khususnya pada sistem pelaporan dan manajemen kasus.
3. Menjadi dasar pengembangan sistem lebih lanjut, misalnya melalui integrasi dengan sistem informasi akademik universitas, penambahan fitur

notifikasi *real-time*, atau pengembangan antarmuka *mobile* untuk memperluas jangkauan akses pelaporan. Selain itu, penelitian ini menghasilkan artefak berupa desain sistem yang dapat diadaptasi oleh perguruan tinggi lain dalam mengembangkan sistem pelaporan PPKPT serupa. Artefak penelitian berupa desain sistem dan dokumentasi teknis akan didiseminasikan melalui publikasi ilmiah agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh peneliti maupun pengembang sistem di institusi lain.